



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Wahyuni Nuzband**

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaa Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M.Si**

Jabatan : Pj. Gubernur Kalimantan Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 28 Januari 2016

Pihak Kedua

Pj. Gubernur Kalimantan Utara

Pihak Pertama

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana
dan Pemerintahan Desa

Drs. TRIYONO BUDI SASONGKO, M.Si

Ir. WAHYUNI NUZBAND
NIP. 19670621 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BPMPPKBPD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam semua bidang Kehidupan	1. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Sosialisasi 2. Prosentase IPG Provinsi Kalimantan Utara 3. Jumlah SKPD yang Menerapkan Anggaran Responsif Gender	40 Orang Peserta Sosialisasi Dua kali Pertemuan Advokasi 30 Peserta yang mengikuti Pelatihan
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Jumlah Informasi yang tersedia. 2. Prosentase Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kekerasan	20 Buku Data yang Dihasilkan 100 % Pelayanan dari Jumlah Pengaduan.
3	Meningkatnya Peran Serta Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kab/Kota layak Anak	1 Kabupaten/Kota Layak Anak
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berperan Aktif	2 Kelembagaan masyarakat yang di bentuk 60 Kelembagaan Masyarakat Desa yang Memahami Pengelolaan Dana Desa 300 Orang Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi
5	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif di Empat Kawasan dan Teknologi Tepat Guna Desa	1. Jumlah Potensi Desa yang Dimanfaatkan	2 Posyantek yang Terbentuk 27 Posyantek yang mengikuti Gelar TTG tingkat Provinsi

			<p>3 Posyantek yang mengikuti Gelar TTG tingkat Nasional</p> <p>5 Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dibentuk</p> <p>18 Lembaga Ekonomi yang dilatih</p>
		2. Prosentase Keterlibatan Kelembagaan Desa	<p>25% Penyusunan Peraturan Desa Yang Berhubungan Dengan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa</p> <p>Satu Kali Rakor Tentang Desa</p>
6.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Jumlah Jenis Pelatihan/Bimtek	<p>24 Peserta yang Mengikuti TOT Keuangan Desa</p> <p>70 Desa Peserta BIMTEK Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>70 Orang dari 35 Desa yang Mengikuti BIMTEK Penguatan Tupoksi</p> <p>7 Desa yang Mengikuti Bimtek Penyusunan Profil Desa</p>
		2. Jumlah Raperda yang Dihasilkan dan Peraturan yang Disosialisasikan	1 (Satu) Raperda yang Dibahas
		3. Jumlah Desa dan Kelurahan yang Berprestasi	3 Desa/Kelurahan yang Mengikuti Pekan Inovasi

			3 Desa/Kelurahan yang Mendapat Juara Lomba Desa
7.	Meningkatkan Cakupan Peserta KB (CPR) Cara Modern	1. Jumlah Peserta KB Aktif Mandiri	3 Orang Penerima Penghargaan Peserta KB Lestari dan Petugas KB Teladan
		2. Jumlah Peserta KB Baru Mandiri	6 Orang Penerima Penghargaan Peserta KB Lestari dan Petugas KB Teladan 30 Orang Peserta Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian KB
8	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Yang Mempunyai Anak Remaja Dalam Kegiatan Bina Keluarga Anak Remaja	Jumlah Keluarga Peserta BKB	3 Orang Kader BKB Penerima Penghargaan Lomba Pengelolaan BKB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.335.430.000,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 930.920.000,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 57.500.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Rp 93.8000.000,00	APBD
5.	Program Keluarga Berencana	Rp 1.349.500.000,00	APBD
6.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 208.740.000,00	APBD
7.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp 951.600.000,00	APBD
8.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 2.048.260.000,00	APBD
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Rp 1.178.570.000,00	APBD
10.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp 1.675.180.000,00	APBD

11.	Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan secara Partisipatif	Rp	2.686.000.000,00	APBD
12.	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp	238.500.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp	243.500.000,00	

Tanjung Selor, 28 Januari 2016

Pihak Kedua
Pj. Gubernur Kalimantan Utara

Drs. TRIYONO BUDI SASONGKO, M.Si

Pihak Pertama
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana
dan Pemerintahan Desa

Ir. WAHYUNI NUZBAND
NIP. 19670621 199203 2 006